



**DARI PARTAI KEADILAN KE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
DINAMIKA PARTAI DAKWAH DI KOTA SEMARANG
TAHUN 1998-2009**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**MUHAMMAD ISMAIL HASAN
NIM 13030113130097**

**PROGRAM STUDI SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Muhammad Ismail Hasan, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasi maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 29 Oktober 2018
Penulis,

Muhammad Ismail Hasan
NIM 13030113130097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jika kau tak mau merasakan penatnya belajar, maka kau akan merasakan pedihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian ”

(Pramoedya Ananta Toer)

Dipersembahkan untuk:
Kedua orang tua dan segenap civitas
akademik Universitas Diponegoro

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing,



Rabith Jihan Amaruli, S.S., M.Hum.
NIP 19830719200912 1 004

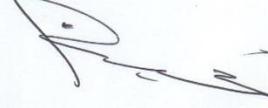
Skripsi dengan judul "Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera: Dinamika Partai Dakwah di Kota Semarang Tahun 1998-2009" yang disusun oleh Muhammad Ismail Hasan (13030113130097) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada 29 Oktober 2018

Ketua,



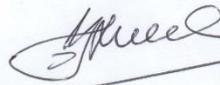
Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 19670311 199303 1 004

Anggota I,



Rabith Jihan Amaruli, S.S., M.Hum.
NIP 19830719200912 1 004

Anggota II,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.
NIP 19561219 198703 2 001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera: Dinamika Sebuah Partai Dakwah di Kota Semarang 1998-2009”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis ketika dapat menyelesaikan skripsi ini setelah berbagai kesulitan dan halangan yang dihadapi.

Skripsi ini membahas mengenai Partai Keadilan yang bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada awal 2000-an. Sebagai partai hasil dari proses reformasi 1998, Partai Keadilan dan PKS menjelma menjadi partai berbasis dakwah yang performanya sangat menjanjikan. Kajian mengenai eksistensi partai dakwah ini telah banyak dilakuka dalam lingkup nasional. Namun, dalam lingkup lokal sejauh pengetahuan penulis, belum pernah dilakukan. Oleh karena itu skripsi ini menarik, melihat geliat partai dakwah dalam perpolitikan di Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati P, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan ijin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan trima kasih kepada Rabith Jihan Amaruli, S.S., M. Hum. selaku dosen pembimbing dan penguji yang dengan kesabaran, perhatian dan di sela-sela kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberi petunjuk, nasihat, semangat yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Alamsyah, M. Hum., selaku dosen wali yang selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Dr. Haryono

Rinardi, M. Hum., Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si. dan Dra. Titiek Suliyati, M.T., yang turut mengoreksi dan memberi masukan, sehingga hasil skripsi ini menjadi lebih baik.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan maksimal, terkhusus kepada Pak Romli, bu Fatma dan mas Oscar.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak seluruh staf-staf dinas yang terkait dengan skripsi ini, Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang, BPS Kota Semarang, Dipo Arsip *Suara Merdeka*, Kantor *Kompas*, yang telah memberi kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih juga penulis ucapkan kepada: Zuber Syafawi, Imam Marjuki, Kastori, Ari Purbono, Agus Riyanto, dan Guruh atas ketersediaan waktunya untuk penulis wawancara.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua terbaik, Agus Riyanto Selamat dan Indah Musyarafah, atas doa, semangat, bantuan moril maupun materiil, dan kesabarannya dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis. Juga saudara-saudara tercinta, kak Said Jundi, dek Rosyid Ridho, dek Adil Mubarak, dek Abdul Naser, dek Ahmad Muhyiyuddin, dan dek Nisrina Sholihah, yang telah banyak memberikan dorongan semangat, doa demi lancarnya penyusunan skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat yang sudah mau menemani penulis untuk mencari sumber dan narasumber serta memberikan dukungan terhadap penulis, Ayup Tirtana, Adib Fadloli, Hammam Waliyuddin, Zidni Syalamsah, Azim Asykari, Azmi Ali-sani, Musthafa Khairi, terima kasih atas kebersamaan kita selama 17 tahun ini. Terima Kasih penulis haturkan untuk teman-teman di Departemen Sejarah angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan, Jihad Soejatmiko, Fajar Farizki, Syafi'il Anam,

Widiazhari, Difan Haris, Albertus Arga, Fatih Yustian, Fajriyatul Laila, Elita Rachmawati dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan, bantuan, doa, dan kebersamaan selama di Departemen Sejarah Undip. Juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Iv
HALAMAN PENGESAHAN	V
KATA PENGANTAR	Vi
DAFTAR ISI	Ix
DAFTAR SINGKATAN	Xi
DAFTAR ISTILAH	Xv
DAFTAR GAMBAR	Xx
DAFTAR TABEL	Xxi
DAFTAR LAMPIRAN	Xxii
ABSTRAK	Xxiii
ABSTRACT	Xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KOTA SEMARANG DAN DINAMIKA POLITIK ISLAM DI KOTA SEMARANG, 1998-2009	23
A. Keadaan Wilayah Kota Semarang	23
1. Keadaan Geografis	23
2. Keadaan Demografis	25
B. Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Budaya	26
1. Kondisi Sosial Politik	26
2. Kondisi Ekonomi	28
3. Kondisi Budaya	30
a. Kondisi Pendidikan	32
b. Kondisi Agama	34
C. Partai Islam di Kota Semarang Pasca-Reformasi 1998-2009	35
1. Suara Masyarakat Islam	35
2. Partai Politik Berbasis Massa Islam	37
3. Kendala Partai Politik Islam	40
BAB III PARTAI KEADILAN KOTA SEMARANG 1998-2003: PUNCAK GERAKAN TARBIYAH	43

A. Embrio Partai Keadilan	43
B. Partai Keadilan Kota Semarang	48
1. Deklarasi Partai Keadilan Kota Semarang	48
2. Nama, Lambang, Visi, dan Misi Partai Keadilan	50
3. Landasan Filosofi Partai Keadilan	54
4. Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai Keadilan di Kota Semarang	56
C. Suara Partai Keadilan Kota Semarang pada Pemilu 1999	60
1. Suara Partai Keadilan Pemilu 1999	60
2. Suara Partai Keadilan Kota Semarang	62
3. Faktor Suara Partai Keadilan Kecil	66
BAB IV PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SEMARANG 2003- 2009: PERUBAHAN CITRA PARTAI DARI EKSKLUSIF KE INKLUSIF	69
A. Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera	69
B. Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang 2003-2009	72
1. Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang	72
2. Filosofi dan Struktur	73
a. Makna Kata Sejahtera	73
b. Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang	74
3. Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera	76
a. Jenjang Pengkaderan Formal PKS	77
b. Pola Perekrutan Melalui Gerakan Tarbiyah	80
C. Suara Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang pada Pemilu 2004 dan 2009	84
1. Pemilu 2004	84
a. Partai Keadilan pada Sejahtera Pemilu 2004	84
b. Suara Pemilu 2004 Partai Keadilan Sejahtera	87
2. Pemilu Tahun 2009	88
a. Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu 2009	88
b. Suara Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2009	91
3. Faktor Kemenangan dan Dana PKS pada Pemilu 2004 dan 2009	93
BAB V SIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	:	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AKIP	:	Analisa Kapasitas dan Integritas Personal
BAI	:	Badan Amal Indonesia
BKK	:	Badan Koordinasi Kemahasiswaan
BMTANDA	:	Badan Mal Wa Tamwil Anda
DAPIL	:	Daerah Pemilihan
DDII	:	Dewan Dakwah Islam Indonesia
DPC	:	Dewan Pengurus Cabang
DPD	:	Dewan Pengurus Daerah
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPW	:	Dewan Pimpinan Wilayah
EKUINTEK	:	Ekonomi, Informasi, dan Teknologi
FKPIS	:	Forum Komunikasi Pelajar Islam Semarang
FSLDK	:	Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus
FSRU	:	Forum Silaturahmi Rohis Universitas
GERINDRA	:	Gerakan Indonesia Raya
GMNU	:	Generasi Muda Nahdatul Ulama
GOLKAR	:	Golongan Rakyat
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HANURA	:	Hati Nurani Rakyat
HUMAS	:	Hubungan Masyarakat
IKIP PGRI	:	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
JATENG	:	Jawa Tengah

KAMI	:	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
KAMMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KIA	:	Kegiatan Internal Anggota
KISP	:	Kajian Ilmu Sosial Politik
KKN	:	Kolusi Korupsi Nepotisme
KPP	:	Komite Pemenangan Pemilu
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
LC	:	License
LDK	:	Lembaga Dakwah Kampus
LIK	:	Lingkungan Industri Kecil
LIPIA	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
LMD	:	Latihan Mujahid Dakwah
LPEU	:	Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat
LSI	:	Lembaga Survei Indonesia
MABIT	:	Malam Bina Islam dan Taqwa
MDPL	:	Meter Diatas Permukaan Laut
MPP	:	Majelis Pertimbangan Partai
MUNAS	:	Musyawaharah Nasional
NKK	:	Normalisasi Kehidupan Kampus
NU	:	Nahdatul Ulama
OPT	:	Orientasi Partai dan Tokoh
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PARPOL	:	Partai Politik
PAY	:	Partai Abul Yatama
PBB	:	Partai Bulan Bintang
PBR	:	Partai Bintang Reformasi
PD	:	Partai Demokrat
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDS	:	Partai Damai Sejahtera
PEMILU	:	Pemilihan Umum
PID	:	Partai Islam Demokrat
PI-PKS	:	Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera
PK	:	Partai Keadilan

PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	:	Partai Keadilan Sejahtera
PKU	:	Partai Kebangkitan Ummat
PMB	:	Partai Masyumi Baru
PNU	:	Partai Nahdatul Ulama
PP	:	Partai Persatuan
PPIIM	:	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
PPK	:	Pelatihan-Pelatihan Kepartaian
PPNUI	:	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Ummah Indonesia
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PSI	:	Partai Suni Indonesia
PSII	:	Partai Syariat Islam Indonesia
PUI	:	Partai Umat Islam
PUMI	:	Partai Umat Muslim Indonesia
ROHIS	:	Rohani Islam
SARA	:	Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
TD	:	Training Dasar
TL	:	Training Lanjutan
TMKS	:	Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial
TOP	:	Training Orientasi Partai
TRP	:	Taklim Rutin Partai
UGM	:	Universitas Gajah Mada
UI	:	Universitas Indonesia
UKI	:	Unit Kerohanian Islam
UKKI	:	Unit Kegiatan Kerohanian Islam
UNDIP	:	Universitas Diponegoro

UNNES : Universitas Negeri Semarang
UNWAHAS : Universitas Wahid Hasyim
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH*

<i>abangan</i>	:	golongan masyarakat yang menganut Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan
<i>afinitas</i>	:	Kecenderungan
<i>akhwat</i>	:	Perempuan
<i>amanah</i>	:	sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan
<i>amar ma'ruf nahi munkar</i>	:	mengajak pada kebaikan dan mencegah pada hal-hal buruk
<i>anashir taghyir</i>	:	pelaku perubahan
<i>apriori</i>	:	beranggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dan sebagainya) keadaan yang sebenarnya
<i>aqidah</i>	:	iman atau kepercayaan
<i>bi'yah</i>	:	menjaga dan melestarikan lingkungan
<i>capptive market</i>	:	situasi dimana tidak ada pilihan (pasar terkurung)
<i>dakwah</i>	:	seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama
<i>daurah</i>	:	sarana pendidikan Islam berupa kegiatan pengumpulan sejumlah anggota yang relatif banyak di suatu tempat untuk mendengarkan ceramah
<i>dekret</i>	:	keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara
<i>dikotomi</i>	:	pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan
<i>diktatorisme</i>	:	paham kepala pemerintah yang mempunyai kekuasaan mutlak
<i>dinamika</i>	:	suatu bentuk perubahan, baik itu sifatnya besar-bersaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

	:	atau lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan
<i>direct selling</i>	:	metode pemasaran secara langsung
dugderan	:	acara dalam penyambutan bulan suci ramadhan di kota semarang
ekstensif	:	dalam kehidupan sehari-hari bermakna mempunyai jangkauan yang luas
ekstrim	:	paling ujung (paling keras dan teguh/fanatik)
<i>electoral threshold</i>	:	ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik dalam pemilihan umum
<i>fikrah</i>	:	pola pikir
forum	:	Wadah
<i>halaqah/liqa'</i>	:	lingkaran pertemuan dalam pengajian
<i>hanif</i>	:	bersih dan lurus
heterogen	:	beraneka ragam
ideologi	:	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
<i>ikhwah</i>	:	persaudaraan sekandung atau seketurunan
<i>ikhwan</i>	:	laki-laki
ikrar	:	janji yang sungguh-sungguh
islamophobia	:	ketakutan terhadap segala sesuatu tentang Islam
<i>istiqomah</i>	:	bertahan dalam melaksanakan kebaikan secara terus-menerus tanpa terputus
<i>jasadiyah</i>	:	jasmani/ fisik dan akal
<i>jihad</i>	:	usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan
kader	:	kumpulan orang yang dibina oleh uatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tertentu
<i>khobar</i>	:	kegiatan berbicara ringan dan kabar dari masing-masing mutarabbi (murid) dalam seminggu terakhir di dalam pertemuan liqo

<i>khadimatul ummah</i>	:	pelayanan masyarakat
<i>khilafah</i>	:	pemimpin atau wakil Allah
<i>khittah</i>	:	pemikiran atau garis besar perjuangan
konfigurasi	:	bentuk/wujud
konstituen	:	bagian yang penting dalam sebuah komponen
liberal	:	bersifat bebas
madani	:	menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, ilmu, teknologi yang beradab
majelis taklim	:	lembaga pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
<i>manhaj</i>	:	kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan
<i>marhalah</i>	:	pelatihan atau pengkaderan
<i>markaz taghyir</i>	:	markas perubahan
<i>mashadirul qarar</i>	:	pusat-pusat kebijakan
mengeliminasi	:	menyingkirkan
mentoring	:	kegiatan pendidikan dan pembinaan agama Islam dalam bentuk pengajian kelompok kecil yang diselenggarakan rutin setiap pekan dan berkelanjutan
misionaris	:	orang yang melakukan penyebaran warta injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus
monumental	:	bersifat menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung
<i>mahasabah diri</i>	:	introspeksi diri
<i>mukhayam</i>	:	sarana tarbiyah melalui latihan fisik dan stimulasi ketaatan agar peserta siap menjadi prajurit dakwah dan mampu menerapkan nilai Islam dalam masyarakat
<i>murabbi</i>	:	Guru
<i>muraja'ah</i>	:	setoran hafalan al quran dan mengulang-ngulangnya secara terus menerus

<i>mutarabbi</i>	:	Murid
<i>muttaba'ah yaumiyah</i>	:	evaluasi ibadah wajib dan sunnah sehari-hari
otoritarianisme	:	bentuk sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan
penetrasi	:	penerobosan
pengaderan	:	proses atau cara mendidik membentuk seseorang menjadi kader
populis	:	berkenaan dengan rakyat kecil
<i>priyayi</i>	:	lapisan masyarakat yang kedudukannya terhormat
<i>rahmatan lil alamin</i>	:	agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta
redefinisi	:	merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut pandang lain
revivalisme	:	menghidupkan kembali bentuk dan makna yang disesuaikan dengan perkembangan zaman
rezim	:	pemerintahan yang berkuasa
<i>rihlah</i>	:	rekreasi atau liburan
<i>risalah</i>	:	pesan-pesan Allah
<i>ruhiyah</i>	:	hubungan erat antara hamba dengan tuhan
<i>sami'na wa ato'na</i>	:	kami dengar dan kami taat atau laksanakan
<i>sihhiyah</i>	:	kesehatan
simpatisan	:	orang yang bersimpati pada partai politik dan sebagainya
skisma	:	perpecahan dalam agama
<i>stembus accord</i>	:	kesepakatan kotak suara dengan menggabungkan sisa suara partai
<i>sunnah kauniyah</i>	:	ketetapan taqdir dari Allah
syiar	:	upaya untuk menyampaikan dan mengenalkan berbagai hal dalam Islam

<i>tabiah al afaqiyah</i>	:	strategi mobilisasi horizontal
<i>tabiah al amudiyyah</i>	:	strategi mobilisasi vertikal
<i>tarbiyah</i>	:	pendidikan
<i>tatsqif</i>	:	forum yaang dihadiri oleh lebih dari dua kelompok halaqah dan bersama-sama membahas ilmu pengetahuan khususna ilmu keIslaman
teologis	:	sifat dasar kepercayaan kepada tuhan dan agama, terutama berdasar pada kitab suci
topografi	:	pemetaan atau keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah
transformatif	:	berubah-ubah bentuk (rupa, macam, sifat, keadaan, dan sebagainya)
transmisi	:	penyebaran
transplantasi pemikiran	:	pemindahan atau pencangkokan pemikiran
<i>ukhrawi</i>	:	perihal akhirat
<i>ukhuwah</i>	:	persaudaraan
<i>ukhuwah Islamiyah</i>	:	persaudaraan Islam

DAFTAR GAMBAR

3.1	Deklarasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan	49
3.1	Lambang Partai Keadilan	52
3.3	Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Periode 2000-2003	58
3.4	Peresmian Pos Keadilan DPC Semarang Tengah	63
3.5	Suasana Bazar di Peresmian Pos Keadilan	64
4.1	Lambang Partai Keadilan Sejahtera	73
4.2	Kepengurusan Partai Keadilan Kota Semarang Periode 2003-2006	75
4.3	Presiden PKS Dr. Hidayat Nur Wahid menyerahkan Secara Simbolis Jerigen Minyak Tanah Kepada Warga Tambak Lorok Semarang	85
4.4	Data Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2009 di Kota Semarang	92
4.5	Deretan Poster PKS	94

DAFTAR TABEL

2.1	Data Luas Wilayah Kota Semarang Per-Kecamatan (Km ²)	24
2.2	Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 1998-2009	25
2.3	Mata Pencarian Penduduk Kota Semarang Tahun 1998-2009	30
2.4	Pemeluk Agama di Kota Semarang Tahun 2009	35

DAFTAR LAMPIRAN

A	Siaran Pers No. 01/SP/DPP-PKS/V/1424 tentang Penggabungan Struktur DPP Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera: Penjaringan Calon Presiden Berbasis Kader dan Masyarakat (Jaringan Capres Emas): Dan Perkembangan Terakhir Seputar Kebohongan Publik Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris Atas Iraq, Jakarta, 20 Juli 2003.	105
B	Surat Keputusan nomer 53/skep/ak-pks/iv/1425 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang.	106
C	Database pengurus DPD PKS Kota Semarang 2006-2010.	107
D	Buku Saku Pemenangan Pemilu 2009 Kader PKS: Mewujudkan Iman dengan Amal Siyasi untuk Kesejahteraan Bangsa.	108
E	Buku Al'Maa'tsurat: Kumpulan Do'a Pagi dan Petang, Karangan Hasan Al-Banna	109

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Dari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera: Dinamika Partai Dakwah di Kota Semarang Tahun 1998-2009”, ini mengaji tentang dinamika Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang yang muncul pada 1998 dengan nama Partai Keadilan. Ada tiga permasalahan yang dikaji yaitu: (1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian Partai Keadilan di Kota Semarang? (2) Bagaimana proses perkembangan Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera di kota Semarang? dan (3) Bagaimana strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam memperoleh suara pada Pemilu 1999-2009?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah, yaitu: a) heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder; b) kritik sumber, yaitu kegiatan menguji otentisitas dan kredibilitas sumber; c) interpretasi, yaitu kegiatan menetapkan hubungan kronologis dan kausal antara fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh; dan d) historiografi, yaitu merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam tulisan sejarah. Skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah dengan perspektif sejarah politik karena mengaji tentang dinamika partai politik Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta sejarah hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Partai Keadilan dideklarasikan pada tahun 1998 dan pada tahun 2003 bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini muncul dari gagasan para aktivis dakwah yang ingin mewujudkan cita-cita dakwah di semua lini kehidupan dan menetapkan Islam sebagai asas partai ini. Partai Keadilan Sejahtera memiliki kewajiban untuk ber *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu, kewajiban untuk seorang manusia untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. *Kedua*, pada perkembangannya, Partai Keadilan harus bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera karena pada Pemilu 1999 di Kota Semarang Partai Keadilan hanya mampu mendapat sebanyak 7.581 suara dan tidak melewati ambang batas ketentuan *electoral threshold*. Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan pada 20 April 2003 sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut *electoral threshold*. Partai Keadilan Sejahtera membuat perkembangan yang signifikan dilihat dari keikutsertaan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004 dan 2009 yang mampu bersaing dengan partai-partai nasionalis. Pada pemilu 2004 PKS mampu mendapatkan suara sebanyak 56.325 suara dan 64.485 suara pada Pemilu 2009. *Ketiga*, Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu 2004 dan 2009 terjadi karena beberapa faktor, yaitu peralihan menjadi partai terbuka, kedekatan para kader dengan masyarakat, persiapan yang matang dari Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2004 dan 2009. Faktor keberhasilan ini terlihat dari banyaknya simpatsan PKS yang lebih beragam dan bukan hanya berasal dari aktivis dakwah. Adapun faktor lain keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2004 dan 2009 adalah faktor kaderisasi internal PKS yang memiliki sistem yang cukup baik dengan memebentuk kader-kader yang berkualitas, solid, dan mempunyai *akhlaq* yang baik. Partai Keadilan Sejahtera menjadikan setiap kader sebagai aset berharga partai.

ABSTRACT

This thesis entitled "From the Justice Party to the Prosperous Justice Party: The Dynamics of the Da'wah Party in Semarang City 1998-2009", this examines the dynamics of the Prosperous Justice Party in the City of Semarang which appeared in 1998 under the name Justice Party. there are three issues discussed, namely: (1) What are the factors behind the establishment of the Justice Party in Semarang City? (2) What is the process of developing the Justice Party to the Prosperous Justice Party in the city of Semarang? (3) How can the Prosperous Justice Party's political strategy obtain votes in the 1999-2009 elections?

The research uses historical method that includes four steps: a) heuristics, which are activities to find and collect historical sources, both primary and secondary sources; b) source criticism, which is to test the authenticity and credibility of the source; c) interpretation, namely the activity of establishing a chronological and causal relationship between historical facts that have been obtained; and d) historiography, which is to reconstructing past events in historical writing. This thesis uses a historical approach with a political history perspective because it examines the dynamics of Islamic political parties, namely the Prosperous Justice Party in the City of Semarang.

The results obtained from this thesis research based on the analysis of historical facts from historical sources are: First, the Justice Party (PK) was declared in 1998 and in 2003 joined the Prosperous Justice Party (PKS). This party emerged from the idea of da'wah activists who want to realize the ideals of da'wah in all walks of life and establish Islam as the principle of this party. The Prosperous Justice Party has an obligation to be amar ma'ruf nahi munkar, it is the obligation for a human being to invite or encourage good things and prevent bad things. Second, in its development, the Justice Party must join the Prosperous Justice Party because in the 1999 Election in Semarang City the Justice Party was only able to get as many as 7,581 votes and did not exceed the threshold of electoral threshold provisions. The Prosperous Justice Party was declared on April 20, 2002 as a strategic step in responding to obstacles regarding the electoral threshold. The Prosperous Justice Party made a significant development as seen from the participation of the Prosperous Justice Party in the 2004 and 2009 elections which were able to compete with nationalist parties. Third, the success of the Prosperous Justice Party in the 2004 and 2009 elections took place due to several factors, namely the transition to an open party, the closeness of the cadres with the community, the thorough preparation of the Prosperous Justice Party in the 2004 and 2009 elections. 2004 and 2009 are PKS internal regeneration factors that have a fairly good system by forming cadres who are quality, solid, and have good morality. The Prosperous Justice Party makes each cadre a valuable party asset.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang dan Permasalahan

Dalam sejarah Indonesia, Masyumi merupakan kekuatan partai politik Islam yang secara konsisten memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam dalam hukum formal di Indonesia. Pilihan politik yang menimbulkan kesan Masyumi tidak memiliki komitmen yang bulat terhadap Pancasila dan NKRI inilah yang memberikan legitimasi dibubarkannya partai berbasis muslim modernis ini. Pada masa Orde Baru, berbagai kelompok warisan Masyumi ini menempatkan dirinya sebagai kelompok oposisi ideologis yang paling gigih memperjuangkan ideologi Islam. dalam kasus asas tunggal Pancasila misalnya, ketika Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta ormas Islam lainnya menerima asas tunggal Pancasila, kelompok-kelompok berkultur Masyumi, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMIMPO) secara kukuh menolaknya. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini secara frontal berhadapan dengan pemerintah dan acap kali mendapatkan perlakuan represif dari pemerintah.¹

Mohammad Natsir dan beberapa tokoh Partai Masyumi Pada 26 Januari 1967 mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta. Pada mulanya lembaga dakwah ini memutuskan diri pada usaha-usaha serius dalam menyiarkan dakwah di tengah gencarnya penetrasi kegiatan misionaris Kristen. Pada perkembangan berikutnya, DDII ikut menanggapi apa yang menjadi ancaman dari kelompok Muslim berhaluan liberal dan kultural yang memiliki tujuan menolak Islam Politik. Kubu Islam Kultural bertujuan melakukan redefinisi relasi antara agama dan politik dengan mendorong toleransi antar-umat beragama. Sebaliknya, DDII adalah pendukung vokal gerakan Islam Politik dengan gencar

¹M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 3.

menebarkan bahwa Islam bukan sekedar agama atau konstruksi teologis, melainkan juga ideologi politik. DDII secara politis berbenturan dengan rezim Soeharto yang tidak menoleransi Islam politik.²

Beberapa peran penting DDII yang sangat menentukan proses transmisi adalah sebagai berikut. *Pertama*, DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan secara serius dan terorganisir mengirim Mahasiswa ke Timur Tengah. *Kedua*, DDII dan Mohammad Natsir menjadi penggagas serta mediator pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (Lipia) yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh. *Ketiga*, DDII menjadi pelopor awal gerakan dakwah kampus. Selain ketiga peran penting tersebut, DDII juga berperan secara tidak langsung dalam mendorong penerjemahan karya-karya dari pemikiran utama gerakan revivalisme Islam Timur Tengah ke dalam bahasa Indonesia. Jauh sebelum gerakan Islam ini eksis, lembaga ini telah aktif mendistribusikan buku-buku terjemahan karya Hasan Al-Banna dan Yusuf Al-Qaradawi. Keduanya adalah ulama gerakan Islam transnasional dari Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimun.³

Masjid-masjid kampus menjadi tempat ideal karena relatif luput dari amatan rezim Orde Baru yang saat itu memiliki kecenderungan Islamophobia. Sejumlah kelompok dan tokoh Islam yang kritis dicurigai dan dilabeli sebagai ekstrim kanan. Rezim kerap menyebar aparatnya untuk memonitor tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok Islam yang sudah ditargetkan untuk membatasi dan melokalisasi aktivitas dakwah mereka dengan alasan untuk stabilitas keamanan. Akan tetapi, tidak dengan mempertimbangkan masjid kampus sebagai ancaman. Rezim Orde Baru menganggap masjid kampus hanya sebagai tempat bagi mahasiswa untuk beribadah dan membahas masalah-masalah *akhirat*. Oleh karena itu, masjid-masjid kampus bukanlah tempat yang harus dikontrol oleh jaringan aparat pemerintah.⁴

²Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 32-33.

³Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm. 91-92.

⁴Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi* (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 110.

Dunia perguruan tinggi pun akhirnya terkena akibat otoritarianisme pemerintah. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Syarif Thayeb menerapkan SK028/U/1974 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang mempersempit ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan begitu, mereka merasakan sempitnya peluang kebebasan dalam berdakwah menebar kebenaran dan kebaikan di Indonesia.⁵

Pada awal 1980-an, dakwah kampus mulai memperkenalkan istilah *usrah* yang dalam bahasa Arab berarti “keluarga”. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengaturan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya dengan sistem dan program yang lebih sistematis. Penggunaan *usrah* dalam program pelatihan keagamaan di kegiatan dakwah kampus mengadopsi sistem pengaderan Ikhwanul Muslimun (IM) Mesir. Hubungan dakwah kampus dengan IM juga difasilitasi dengan menawarkan karya-karya monumental para tokoh IM sebagai referensi utama dalam kajian. Dengan demikian, terjalinlah proses dan gagasan yang menjadikan model-model aktivitas dan gerakan intelektual IM. Proses transplantasi pemikiran dan metode Ikhwan ke dalam kelompok-kelompok dakwah kampus dimungkinkan oleh jejaring ekstensif yang dimiliki oleh DDII. Sejak didirikan pada 1967, DDII memang mengarahkan kiblat gerakan ke Timur Tengah.⁶

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi sentral aktivitas keislaman yang semakin beragam, mulai dari kegiatan syiar Islam, pelatihan, mentoring, pengaderan, dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷ Upaya menjalin komunikasi antar-LDK dari berbagai perguruan tinggi, dilakukan dengan membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Melalui wadah ini para aktivis Islam dari berbagai kampus bertemu dan berdiskusi tentang berbagai hal yang menyangkut dakwah.⁸

⁵Hassan, dkk., ed., *Memilih Partai Islam*, hlm. 30.

⁶Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, hlm. 37.

⁷Mahfud Siddiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 72.

⁸Andi Rahmat dan Mukhammad Najib, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus* (Yogyakarta: Proetika Cetakan I, 2007), hlm. 25.

Pada 1998, mereka ikut merespon perkembangan politik Indonesia dengan membentuk organisasi formal bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).⁹ Pertemuan tahunan FSLDK ke-10 di Malang pada 1998 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia dimanfaatkan oleh beberapa aktivis LDK untuk mengumumkan pembentukan KAMMI. KAMMI didirikan oleh para aktivis FSLDK yang memiliki hubungan dengan Kelompok Tarbiyah dan Ikhwah.¹⁰

Lengsernya Soeharto pada 1998 memungkinkan iklim kebebasan mulai muncul. Akan tetapi, bukan berarti perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dakwah sudah selesai. Perjalanan masih panjang karena dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih berada dalam jurang keterbelakangan. Perjuangan gerakan dakwah harus dilanjutkan. Musyawarah yang dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa iklim yang berkembang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya meraih cita-cita dan mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang dicintai oleh Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara demokratis yang dapat diterima banyak orang. Oleh sebab itu, mereka sepakat untuk mengokohkan sebuah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan.¹¹

Partai Keadilan dideklarasikan pada Minggu, 9 Agustus 1998. Ribuan massa memadati Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan menyambut deklarasi partai baru tersebut. Deklarasi Partai Keadilan dinyatakan oleh Dr. Nur Mahmudi Isma'il selaku Presiden DPP Partai Keadilan; Ketua Majelis Syura dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai dipimpin oleh Dr. M. Hidayat Nurwahid, M.A.; Dewan Syari'ah dipimpin oleh Dr. Salim Segaf Aljufri, M.A.; dan Sekertaris Umum DPP Partai Keadilan dipercayakan kepada Luthfi Hasan Ishaq, M.A.¹²

Partai Keadilan merupakan cerminan dari cara pandang aktivisnya terhadap Islam dan langkah-langkah berjenjang dalam cita-cita dakwah Islam yang akan

⁹Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm. 34.

¹⁰Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, hlm. 43.

¹¹Keadilan, *Jati Diri Partai Keadilan*, hlm. 13.

¹²“Partai Keadilan Dideklarasikan”, *Kompas*, 10 Agustus 1998, hlm. 6.

dicapai. Pokok-pokok pikiran yang melandasi pendirian partai ini ialah kenyataan bahwa manusia sebagai *khilafah* Allah di bumi, tidak mungkin mengelak dari tanggung jawabnya melaksanakan misi *khilafah*, yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang paling otentik. Hal itu didasari oleh keluhuran misi yang merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh setiap insan sesuai dengan hukum-hukumnya yang dimanifestasikan di dalam Al-Quran.¹³

Partai Keadilan dalam waktu yang relatif singkat berhasil membangun kepengurusan partai dan memenuhi persyaratan mengikuti Pemilu. Pada 1999 Partai Keadilan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu dan berhasil memperoleh 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara.¹⁴ Partai berlambang ka'bah dengan gambar dua bulan sabit mengarah ke kanan dan ke kiri itu populer di kalangan kaum muda dan kampus-kampus. Berbeda dengan sejumlah partai yang memasang tokoh-tokoh "lama dan punya nama" dalam susunan DPP-nya, hampir seluruh pengurus Partai Keadilan adalah muka-muka baru.¹⁵ Pada 17 April 2003, Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa pencapaian pada Pemilu 1999 tidak memungkinkan bagi keberlanjutan partai ini. Ketentuan *electoral threshold* mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% suara jika ingin mengikuti Pemilu berikutnya. Berdasar pada UU Pemilu Tahun 1999 Pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam Pemilu menyatakan bahwa Partai Keadilan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum pada 2004, kecuali jika Partai Keadilan bersedia untuk bergabung dengan partai lainnya atau mendirikan partai politik baru.¹⁶

Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan kepada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf. Pada berbagai rapat yang cukup dinamis, disepakati untuk menambahkan kata "Sejahtera" sebagai nama partai

¹³Hassan, dkk., ed., *Memilih Partai Islam*, hlm. 33.

¹⁴Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm. 36.

¹⁵Nur Mahmudi Ismail, "Tentang Kerukunan", *Kompas*, 16 Januari 1999, hlm. 12.

¹⁶Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm. 37.

baru menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).¹⁷ PKS secara resmi berdiri pada 20 April 2002 sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut *electoral threshold*. Dengan demikian, visi dan misi partai tidak bergeser dari *khittah* Partai Keadilan dan kalau pun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata. Atas dasar kesamaan visi dan misi tersebut, Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke-XIII yang berlangsung di Wisma Haji, Bekasi, Jawa Barat pada 17 April 2003 memutuskan Partai Keadilan menggabungkan diri dengan PKS.¹⁸

PKS mempunyai silsilah intelektual langsung dengan Ikhwan Muslimun (IM), yang memberikan contoh bagaimana model IM diterapkan, diadaptasi, dan dikesampingkan dalam konteks demokrasi. Sementara ide-ide IM di Indonesia dapat dilacak pada 1970 dimana model pemikiran aktivisme organisasi tersebut mulai mengakar di Indonesia sebagai model perjuangan Islam. Proses ini dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu penyebaran gagasan melalui publikasi, ceramah, dan seminar intelektual.¹⁹

Di kota Semarang, Partai Keadilan juga mulai berpartisipasi dalam kelangsungan demokrasi. Pada pemilihan umum 7 Juni 1999, untuk pertama kalinya Partai Keadilan ikut berpartisipasi dengan memperoleh 7.581 suara di Kota Semarang.²⁰ Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan tidak mendapatkan kursi di pemerintahan kota Semarang. Pada Pemilu 2004, Partai Keadilan yang sudah berganti nama menjadi PKS mendapatkan perolehan suara yang meningkat di wilayah kota Semarang sebanyak 56.325 suara yang berpartisipasi untuk mendukung PKS dan mendapatkan kursi di pemerintahan Kota Semarang

¹⁷Aay Muhammad Furqon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Teraju, 2004) hlm. 230.

¹⁸“Partai Keadilan Resmi Gabung ke Partai Keadilan Sejahtera”, *Kompas*, 19 April 2003, hlm. 07.

¹⁹Anthony Bubalo, Greg Fealy, dan Whit Mason, *PKS dan Kembarannya: Bergiat Menjadi Demokrat di Indonesia, Mesir, Turki* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 47.

²⁰“Perolehan Suara Daerah-Daerah Tingkat II Jateng”, *Suara Merdeka*, 3 Agustus 1999, hlm. 13.

sebanyak lima kursi.²¹ Pada Pemilu 2009 suara PKS semakin meningkat dengan mendapatkan 64.485 suara di Kota Semarang dan mendapatkan 6 (enam) kursi di pemerintahan Kota Semarang. Semua daerah pemilihan diwakili oleh satu orang kader PKS.²² Tahun 2009 dapat dibilang menjadi puncak kejayaan PKS di Semarang.

Kota Semarang adalah Ibu Kota dari wilayah provinsi Jawa Tengah yang memiliki kultur keagamaan yang dapat dikatakan *abangan*. Kultur budaya masyarakat Semarang yang *abangan* ini juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam berpolitik. PKS sebagai partai dakwah tentu juga memiliki strategi khusus dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat *abangan* di Kota Semarang. Sebagai partai baru, PKS selalu berhati-hati dalam melakukan kampanye di kota Semarang, dengan cara bakti sosial, pidato kepada masyarakat, memperkenalkan PKS dengan sangat santun dan sopan kepada masyarakat, meskipun banyak masyarakat Semarang yang tidak suka dengan PKS.²³

Selama masa Reformasi telah berlangsung tiga kali pemilihan umum, yakni 1999, 2004, dan 2009. Pada tiga pemilihan umum tersebut, di Kota Semarang, perolehan suara PKS selalu meningkat, hal ini tidak lepas dari perjuangan kader PKS yang selalu berusaha untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum. Mereka selalu mengatakan bahwa kemenangan partai adalah kemenangan Islam. Mereka yakin jika partainya menang, akan menjadi kemenangan Islam. Inilah yang menjadi motivasi mereka. Mereka terus menerus melakukan gerakan dakwahnya. Kader PKS mengaku sebagai gerakan dakwah yang optimis akan kedatangan kemenangan Islam. Sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam dakwah, maka dakwah dapat disinergikan ke dalam kegiatan politik, karena hakikat dakwah dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa

²¹Arsip Data Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 (Koleksi Arsip DPD PKS Kota Semarang tahun 2014).

²²Wawancara dengan Guruh, 15 Desember 2016. Ia adalah Wakil Sekertaris Umum (Wasekum) DPD PKS Semarang.

²³Wawancara dengan Ustadz Zuber Safawi, 11 Maret 2017. Ia adalah Ketua DPW Partai Keadilan periode 1999.

kehidupan yang lebih baik. Politik bagi kader PKS merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan, karena politik berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dinamika perubahan Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah partai dakwah di Kota Semarang dari 1998 sampai dengan 2009. Rumusan masalah tersebut dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian Partai Keadilan di Kota Semarang. Pertanyaan ini dapat dilacak melalui wawancara dengan para tokoh-tokoh Partai Keadilan Kota Semarang dan para aktivis dakwah kampus di Kota Semarang. *Kedua*, bagaimana proses perkembangan Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera di kota Semarang. Pertanyaan ini dapat dilacak melalui wawancara para tokoh Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang juga data-data yang diperoleh melalui Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Kota Semarang dan koran-koran yang menulis tentang perkembangan Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera, seperti koran *Suara Merdeka* dan *Kompas*. *Ketiga*, bagaimana strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam memperoleh suara pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pertanyaan ini dapat dilacak melalui wawancara para tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang, juga data hasil perhitungan suara Pemilu 1999, 2004, dan 2009, data ini didapat dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang.

B. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini lebih berfokus pada permasalahan yang dikaji, maka perlu diberikan batasan-batasan yang sesuai dengan kaidah ilmu sejarah. Penulisan skripsi ini menggunakan batasan-batasan yang mencakup ruang lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup keilmuan.²⁴

Lingkup spasial merupakan batasan regional yang digunakan dalam skripsi ini. Lingkup spasial pada skripsi ini fokus pada lingkup Kota Semarang. Alasan penulis mengambil lingkup spasial Kota Semarang karena penelitian mengenai Partai Keadilan Sejahtera sudah banyak dibuat, tetapi masih fokus pada kajian

²⁴Sartono Kartodirjo *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia 1992), hlm. 54-55.

tingkat nasional. Kajian mengenai Partai Keadilan Sejahtera tidak banyak dilakukan di tingkat lokal. Alasan lain penulis mengambil lingkup Kota Semarang dalam skripsi ini karena Kota Semarang merupakan kota dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Akan tetapi, Partai Islam di Kota Semarang tidak banyak mendapatkan suara dari masyarakat Kota Semarang. Hal ini disebabkan mayoritas orientasi politik masyarakat Kota Semarang adalah pemilih Partai Nasionalis. Hal ini terlihat pada hasil Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pada Pemilu 1999, PDIP benar-benar memperlihatkan kekuasaannya di Kota Semarang, terbukti parpol berlambang banteng ini mengumpulkan suara sebesar 325.128 suara masyarakat Kota Semarang.²⁵ Pada Pemilu 2004, PDIP pun masih belum tergoyahkan dan langgasing memimpin perolehan suara di Kota Semarang dengan 208.211 suara.²⁶ Pada Pemilu 2009, PDIP harus menyerahkan peringkat pertamanya kepada Partai Demokrat. Hal ini dipastikan oleh KPU Kota Semarang Setelah penyelesaian proses rekapitulasi penghitungan suara. Partai Demokrat mendapatkan 196.766 suara atau 28,01% Suara, sedangkan PDIP mendapatkan 115.172 suara.²⁷ Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Semarang yang mayoritas beragama Islam, tetapi enggan untuk memilih Partai Islam dan lebih memilih Partai Nasionalis. Sebaliknya dengan PKS yang menjadikan Islam sebagai ideologi partai. Hal ini lah yang menjadikan keunikan dalam skripsi ini, bagaimana PKS sebagai partai yang berideologi Islam harus bertarung untuk memenangkan perpolitikan di Kota Semarang.

Ruang lingkup temporal merupakan pembatasan kurun waktu terjadinya peristiwa yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu dari 1998 sampai dengan 2009. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu 1998 sebagai batasan awal penulisan karena bertepatan dengan dideklarasikannya Partai

²⁵“Benteng “Mencereng” Lipat 4 dari Golkar”, *Suara Merdeka*, Rabu, 9 Juni 1999, hlm. 2.

²⁶Arsip Data Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Semarang Per-Kecamatan Pemilu 2004 (Koleksi Arsip DPD PKS Kota Semarang Tahun 2004).

²⁷“Demokrat Pastikan Kemenangan”, *Suara Merdeka*, 19 April 2009, hlm. 3.

Keadilan yang selanjutnya dikenal dengan PKS.²⁸ Batasan akhir penulisan skripsi ini adalah 2009, perolehan suara PKS di Pemilu Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan dari 1999 yang hanya memperoleh 7.851 suara,²⁹ pada 2004 memperoleh 56.325 suara,³⁰ dan meningkat menjadi 66.248 suara pada Pemilu 2009.³¹ Hal tersebut menjadi sesuatu yang cukup istimewa karena PKS merupakan partai Islam yang masih baru di kancah politik, sedangkan Kota Semarang adalah kota yang didominasi oleh partai-partai nasionalis dengan dukungan mayoritas masyarakat Islam.

Ruang lingkup keilmuan skripsi ini dapat digolongkan ke dalam disiplin Ilmu Sejarah Politik. Menurut Kuntowijoyo, konsep politik berhubungan dengan peristiwa sejarah yaitu gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik serta sosialisasi politik.³² Studi kasus dalam skripsi ini adalah PKS di Kota Semarang yang meliputi perubahan dari Partai Keadilan ke PKS, dan suara berikut strategi perolehan suara PKS sebagai partai Islam, khususnya di Kota Semarang.

C. Tujuan penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, skripsi ini di dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut. *Pertama*, mengungkapkan faktor pendirian Partai Keadilan di Kota Semarang. *Kedua*, mendeskripsikan peralihan Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang. *Ketiga*, menggambarkan strategi-strategi Partai Keadilan di Kota Semarang dalam memperoleh suara pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009.

²⁸“Partai Keadilan Dideklarasikan”, *Kompas*, 10 Agustus 1998, hlm. 6.

²⁹“Perolehan suara daerah-daerah tingkat II Jateng”, *Suara Merdeka*, 3 Agustus 1999, hlm. 13.

³⁰Arsip Data Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Semarang Per-Kecamatan Pemilu 2004 (Koleksi Arsip DPD PKS Kota Semarang Tahun 2004).

³¹Wawancara dengan Guruh, 15 Desember 2016.

³² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 173.

D. Tinjauan pustaka

Sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pustaka buku yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pustaka pertama adalah buku dari Lili Romli yang berjudul *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*.³³ Buku ini mencoba mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam setiap kurun waktu dalam sejarah politik Indonesia moderen. Dimulai dari 1945 sampai 2005, fokus perhatian yang diberikan adalah pada pertumbuhan partai-partai Islam pada masa reformasi dan hubungannya dengan negara. Gerakan reformasi yang puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 telah memungkinkan terjadinya terbukanya katup politik dengan adanya kebebasan membentuk atau mendirikan organisasi atau partai politik dengan berbagai aliran. Partai politik pasca-Orde Baru mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut, 148 mendaftarkan diri ke departemen kehakiman dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari jumlah tersebut, setelah melalui seleksi, yang memenuhi syarat ikut Pemilu tahun 1999 hanya 48 partai politik.

Dari ke-48 partai tersebut, 12 partai di antaranya merupakan partai politik yang menjadikan Islam sebagai asasnya, dan lima partai yang menjadikan Islam dan Pancasila sebagai asasnya, sehingga total ada 17 partai Islam di Pemilu 1999. Islam Politik yang mewujud melalui banyaknya partai Islam tersebut tidak dengan serta-merta membuahkan kemenangan politik Islam. Hal ini tampak pada Pemilu 1999 yang menempatkan sejumlah partai politik Islam mengalami keterpurukan dalam mendulang perolehan suara. Ini menunjukkan bahwa meskipun di Indonesia secara statistik mayoritas pemeluknya beragama Islam, namun dalam hal pilihan politik umat Islam tidak secara otomatis menjadi pendukung partai-partai politik Islam. Buku ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman terhadap hubungan Islam dan politik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, buku ini relevan untuk memberikan gambaran tentang partai Islam

³³Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

yang dapat penulis gunakan sebagai referensi dalam menggambarkan aspek historis dari partai politik Islam.

Pustaka kedua adalah disertasi dari Abdurakhman yang berjudul “Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional”.³⁴ Disertasi ini menjelaskan tentang pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimun (IM) terhadap Gerakan Tarbiyah yang tumbuh dan berkembang dari gerakan dakwah kampus. Selain beraktivitas dakwah, Gerakan Tarbiyah juga beraktivitas melalui sayap politiknya dengan membentuk PKS yang merupakan sayap dari Gerakan Tarbiyah. Hal ini membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merasa tergerus otoritasnya oleh Gerakan Tarbiyah. Kekhawatiran yang dimunculkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama direspon oleh Gerakan Tarbiyah dengan melakukan proses penyesuaian atau proses internalisasi organisasi dengan realita sosial yang terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak kepada pemikiran IM yang diadopsi oleh Gerakan Tarbiyah. Pemikiran IM tidak lagi sepenuhnya memengaruhi gerak langkah dari Gerakan Tarbiyah. Hal ini terlihat dari respon kalangan intelektual Gerakan Tarbiyah terhadap realita sosial yang berkembang di masyarakat. Perubahan-perubahan yang mereka lakukan pada *manhaj* mereka terimplementasi dalam aktivitas sayap politiknya, yaitu PKS. Relevansi dari disertasi Abdurakhman dengan penelitian ini adalah dapat membantu penulis menjelaskan tentang embrio PKS yang berasal dari Gerakan Tarbiyah, dan memberikan gambaran pada penulis tentang asal-usul dari PKS. Kelemahan dari disertasi Abdurkhman adalah banyak kata-kata yang sulit dipahami.

Pustaka ketiga adalah karya Burhanuddin Muhtadi yang berjudul *Dilema PKS: Suara dan Syariah*.³⁵ Buku ini menjelaskan tentang sejarah Partai Keadilan menjadi PKS dan tantangan PKS masa depan. Buku ini juga memotret fenomena PKS dari sudut pandang keilmuan, mulai dari asal-usulnya sebagai Jamaah

³⁴Abdurakhman, “Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional”, (Disertasi pada Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Depok, 2013).

³⁵Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Menariknya buku ini juga menerangkan pula bagaimana strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamisnya di panggung politik Indonesia. Perbedaan buku karangan Burhanuddin dengan isi Skripsi ini terletak pada lingkup spasial, jikalau buku Burhanuddin menjelaskan mengenai PKS di kancah nasional, skripsi ini membahas PKS di Kota Semarang. Isi dari buku Burhanuddin membahas tentang tokoh, dinamika dan partisipasi PKS pada Pemilu di kancah nasional, Skripsi ini membahas mengenai tokoh, dinamika dan partisipasi PKS pada Pemilu di Kota Semarang.

Pustaka keempat adalah karya M. Imdadun Rahmat yang berjudul *Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera: Dari Masjid ke Gedung Parlemen*.³⁶ Buku ini menjelaskan bagaimana perjalanan PKS. PKS merupakan partai yang diprakarsai oleh para aktivis dakwah kampus. Di kampus, mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Buku ini juga menjelaskan bagaimana PKS menjalankan dakwah di dalam perpolitikan di Indonesia. Ideologi-ideologi politik dari PKS juga banyak muncul ada dalam buku ini. Relevansi buku ini dengan penelitian penulis, yaitu membantu penulis mengetahui pemikiran Gerakan Tarbiyah yang menjadikan PKS sebagai sayap politik Gerakan Tarbiyah. Buku ini juga menjelaskan sejarah dari awal pembentukan Partai Keadilan bagaimana proses perjalanan siapa saja tokoh-tokoh politik dari Partai Keadilan, bagaimana proses perubahan dari Partai Keadilan ke PKS, dan siapa saja yang berpengaruh di dalam PKS.

Pustaka kelima yang penulis jadikan acuan adalah skripsi karya Anton berjudul “Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Semarang dalam mengisi Reformasi Tahun 1998-2009”.³⁷ Skripsi ini menjelaskan

³⁶M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008).

³⁷Anton, “Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Semarang Dalam mengisi Reformasi Tahun 1998-2009” (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Kota Semarang 2013).

tentang bagaimana latar belakang kemunculan KAMMI Kota Semarang, perkembangan, dan perannya dalam gerakan mahasiswa serta pemerintah Kota Semarang. KAMMI merupakan kesatuan aksi yang dibuat oleh Aktivis Dakwah/ Gerakan Tarbiyah guna mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Kota Semarang. Relevansi Skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu KAMMI dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki kesamaan visi dan misi tentang Dakwah Islam di Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang akan ditulis dalam penelitian ini. Manfaat lain Skripsi karangan Anton ini adalah dimana peneliti bisa mendapatkan informan yang bisa memberi data sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

Berbeda dengan pustaka-pustaka di atas skripsi ini fokus pada dinamika dan perubahan dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang. Fokus penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah, kiprah, dan eksistensi partai dakwah di kota berbasis pemilih partai nasionalis ini.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang dipakai dalam membuat analisa itu. Rekonstruksi sejarah adalah penyusunan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori. Dengan demikian proses rekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, dari mana sudut pandang yang digunakan, dari berbagai dimensi mana yang diperhatikan, dan unsur-unsur apa saja yang harus dikupas.³⁸

Partai politik sebagai salah satu instrumen berperan penting guna memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan bangsa, menumbuhkan kesadaran politik bagi warga negara, sehingga sadar dan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi politik secara aktif dengan segala bentuk partisipasinya yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu usaha pembentukan sikap akan

³⁸Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 2-4.

kesadaran berbangsa dan bernegara adalah pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat luas. Peran partai politik sebagai mediator atau organisasi corong (*channeling organisator*) antar kepentingan masyarakat dan negara. Partai politik pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan demokratis dan alat masyarakat dalam menyalurkan kepentingannya. Partai politik adalah institusi yang memiliki cara berpola yang sudah berlangsung lama dan berulang-ulang untuk melakukan berbagai hal. Partai politik memiliki sejumlah tugas internal yang unik termasuk mengorganisir dukungan masyarakat, menghargai para aktivisnya, memodifikasi strategi electoral, menciptakan partai yang kohesif dalam menjalankan perannya di legislatif, memastikan soliditas partai politik, memperluas dukungan electoral dan memertahankan kekuatan electoral.³⁹

Di sini peneliti berbicara mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti yang kita ketahui PKS merupakan partai yang mempunyai asas dan basis massa Islam. Selain berbicara tentang partai politik penelitian ini sekaligus berbicara mengenai politik Islam. Terdapat tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam, mengenai pandangan hubungan antara agama dan negara. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara bangsa dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). Paradigma ini melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mencakup politik atau negara. *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). Berdasar pada argumen bahwa agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan kedua. Namun, dalam kalangan Islam, pemikiran tentang pemisah antara agama dan negara ini

³⁹Noor, *Perpecahan dan Soliditas*, hlm. 11.

bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan yang dilontarkan tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada.⁴⁰

Mereka yang menyatakan bawa agama dan negara tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan adalah Ikhwanul Muslimun (IM). IM adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang paling besar. Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di wilayah lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Hassan Al-Banna di Mesir, pada April 1928.⁴¹ Organisasi ini menyeru untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-sunnah serta mengajak kepada penerapan syariat Islam dalam kehidupan nyata. Tujuan gerakan ini adalah membendung arus sekularisasi di dunia Arab dan Islam. Pemahaman IM terhadap Islam bersifat universal, tidak mengenal adanya pemisah antara satu aspek dengan aspek lainnya. IM berusaha keras memperluas kawasan gerakannya sampai menjadi sebuah gerakan internasional.⁴²

Pada anggaran dasar IM disebutkan, bahwa tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Agenda gerakan yang dilakukan IM meliputi dakwah melalui media massa, mengupayakan terwujudnya aturan-aturan publik yang lebih islami, mendirikan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Secara umum, pemikiran IM dibangun berdasar premis awal bahwa Islam merupakan agama yang meliputi segala segi kehidupan dan menjadikan Al-Quran dan As-sunnah sebagai landasan bagi setiap aktivitas hidup baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Maka Islam harus mewarnai seluruh bangunan

⁴⁰Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah perkembangan partai-Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm. 21.

⁴¹M. Imdadum Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 31.

⁴²Lembaga Pengkajian dan penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002), hlm. 7.

sistem hidup umat Islam. Oleh karena itu, dakwah Islam harus menjangkau seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh meninggalkan satu aspek pun.⁴³

Pemikiran-pemikiran IM menginspirasi kelahiran Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Mengenai proses penyerapan para Aktivistis Tarbiyah di Indonesia terhadap pemikiran IM terdapat dua penjelasan. *Pertama*, pemikiran-pemikiran IM terjadi melalui forum-forum jaringan dakwah kampus. *Kedua*, transmisi pemikiran IM baik melalui para alumni lembaga pendidikan di Timur Tengah maupun alumnus Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (Lipia) Jakarta yang merupakan cabang Universitas Islam Ibnu Saud Riyadh, Arab Saudi. Persentuhan mahasiswa Indonesia dengan pemikiran dan ide-ide IM terjadi melalui sarana dan modus yang beragam. Setidaknya ada lima sarana dan modus yang menjadi jalan mereka untuk mendalami pemikiran IM. *Pertama*, melalui buku-buku karya para tokoh-tokoh IM yang dibaca oleh para mahasiswa Indonesia. *Kedua*, melalui materi kuliah yang disampaikan para dosen dan ceramah-ceramah mereka dalam kegiatan intra kampus. *Ketiga*, melalui forum-forum ilmiah yang menghadirkan para tokoh atau para aktivis IM. *Keempat*, melalui forum-forum kecil yang mereka adakan sendiri di bawah bimbingan para senior (*murrabi*). *Kelima*, melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis jaringan IM di Arab Saudi atau di Mesir.⁴⁴

Gerakan Tarbiyah tumbuh, bersemi sepanjang 1980-an dan 1990-an. Struktur organisasi utamanya adalah *usra* (kekeluargaan). Para anggotanya mempelajari teks-teks Islam secara bersama-sama, menjelaskan shalat dan puasa bersama, dan sering pula berbagi aktivitas sosial dan komersial. Kegiatan-kegiatan utamanya ialah *halaqah* (secara harfiah berarti 'lingkaran' kelompok diskusi) dan *liqa* (pertemuan) di mana para anggotanya secara berkala berkumpul melingkar mempelajari teks-teks tertentu, mendiskusikan isu-isu untuk

⁴³Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal*, hlm. 32.

⁴⁴Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal*, hlm. 86-94.

kepentingan bersama, dan membantu satu sama lain dalam mengatasi masalah umum.⁴⁵

Pada 1998, dalam merespon perkembangan politik Indonesia mereka kemudian membentuk organisasi formal bernama KAMMI. Setelah itu, pada Agustus 1998, mereka membentuk Partai Politik bernama Partai Keadilan. Partai yang dideklarasikan oleh 52 tokoh Gerakan Tarbiyah ini berhasil mengikuti Pemilu 1999 dan menjangkau suara sebanyak 1.436.565 suara. Pada proses selanjutnya, dikarenakan terbenturnya ketentuan *electoral threshold*, Partai Keadilan tidak dapat ikut dalam Pemilu 2004. Sebagai upaya agar tetap bisa mengikuti Pemilu 2004 maka partai ini bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.

F. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menerapkan metode penelitian sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis sumber sejarah dan merupakan alat bantu bagi sejarawan dalam melakukan analisis dan penelitiannya. Menurut Nugroho Notosusanto, Metode Sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sistematis untuk memberikan bantuan bagi penelitian sejarah.⁴⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁴⁷

Tahap *pertama*, heuristik adalah tahap pengumpulan data berupa sumber-sumber tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang berupa arsip dapat dikatakan langka, karena sebagian besar arsip telah hilang atau musnah dalam peristiwa tersebut. Selain sumber primer tertulis ada juga sumber primer lisan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan orang-orang yang berkompeten. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap dan sekaligus

⁴⁵Bubalo, Fealy, dan Mason, *PKS dan Kembarannya*, hlm. 49.

⁴⁶Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hlm. 24.

⁴⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1945), hlm. 15.

pembandingan sumber tertulis.⁴⁸ Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin baik pula proses penelitian dan penulisan sejarah.⁴⁹ Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibandingkan, sehingga akan diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa, orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak terlibat langsung di dalamnya, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa, tetapi mendapat keterangan dari orang yang terlibat dalam peristiwa. Sumber sekunder, yaitu sumber yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbitan yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi ini meliputi sumber premier dan sekunder. Sumber premier, yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan), benda-benda arkeologi (sumber benda), dan dokumen-dokumen, naskah perjanjian; serta arsip (sumber tertulis). Sumber-sumber tertulis itu berupa artikel-artikel, surat kabar dan kliping koran yang memuat tentang PKS di Kota Semarang. Sumber tersebut diperoleh dari Dipo Arsip *Suara Merdeka* Kota Semarang, kantor *Kompas* Kota Semarang, Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS kota Semarang, dan koleksi pribadi kader PKS. Sumber-sumber primer yang didapat terutama dari kantor DPD PKS sebagai berikut. *Pertama*, AD/ART PKS tahun 2005; *Kedua*, data perolehan suara PKS, dan partai-partai lain di Kota Semarang periode 2004 dan 2009; *Ketiga*, data siapa saja ketua DPD PKS di Kota Semarang dari 1998-2009; *Keempat*, data para kader yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 2004 dan 2009; *Kelima*, data struktur kepengurusan PKS Kota Semarang periode 2003 dan 2005; *Keenam*, arsip Siaran Pres No. 01/SP/DPP-PKS/V/1424

⁴⁸ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 35.

⁴⁹Abdurrahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Histografi* (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 139.

tentang Pengabungan Struktur DPP Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain data yang didapat dari DPD PKS Kota Semarang ada juga data yang didapat dari koleksi para kader PKS antara lain, *Buku Saku Pemenangan Pemilu 2009 Kader PKS*, Foto-foto aktivitas Partai Keadilan, dan buku Al-Ma'tsurat. Buku Al-Ma'tsurat ini merupakan sekumpulan Hadits-Hadits dan Ayat Al-Qur'an yang terpilih, kemudian disusun oleh Hassan Al-Banna menjadi sebuah buku untuk doa di pagi hari dan petang hari. Buku ini wajib dimiliki oleh para kader PKS.

Selain sumber tertulis sumber primer lisan juga digunakan dalam penelitian ini. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku sejarah yang berkaitan dengan PKS di Kota Semarang. Di sini penulis melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. *Pertama*, adalah Zuber Safawi. Ia adalah salah satu tokoh penting PKS Kota Semarang. Ia mengetahui tentang bagaimana awal mula Partai Keadilan sampai menjadi PKS di Kota Semarang. *Kedua*, adalah Kastori. Ia adalah Ketua pertama Partai Keadilan kota Semarang. Ia banyak mengetahui tentang awal mula Partai Keadilan dan pada masa awal Partai Keadilan di Kota Semarang. *Ketiga*, adalah Imam Mardjuki. Imam Mardjuki adalah Ketua Rohis Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada 1998. Ia banyak mengetahui embrio-embrio kader dan awal mual pergerakan dakwah kampus di Kota Semarang. *Keempat*, adalah Joko Widodo. Ia merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Kota Semarang periode 2000-2002. Ia banyak mengetahui proses perubahan Partai Keadilan menjadi PKS. *Kelima*, adalah Guruh. Ia adalah sekertaris umum PKS Kota Semarang Periode 2010-2015 dan banyak mengetahui data-data perolehan suara dan kursi PKS kota Semarang. *Keenam*, adalah Ari Purbono. Ia adalah Ketua PKS Kota Semarang periode 2015-2020 dan *Ketujuh*, adalah Agus Riyanto, ia adalah bendahara umum Partai Keadilan Kota Semarang periode 1999. Keduanya banyak mengetahui perkembangan, perubahan, dan sejarah dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang.

Sumber sekunder berupa buku referensi dan majalah serta surat kabar diperzoleh dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah di Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, perpustakaan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, dan Kantor DPD PKS Kota Semarang. Selain itu sumber-

sumber sekunder juga diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi pribadi dari Zuber Syafawi, dan beberapa Kader PKS.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap *kedua* dilakukan pengujian sumber melalui kritik eksteren dan interen.⁵⁰ Kritik eksteren dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber. Oleh karena banyak dokumen yang dikeluarkan merupakan salinan dari aslinya, maka harus dikoroborasikan dengan sumber lainnya. Langkah itu penting dilakukan mengingat dokumen yang diragukan keasliannya akan mempengaruhi kredibilitasnya. Untuk itu, selain dilakukan kritik eksteren juga dilakukan kritik interen untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Membanding-bandingkan informasi satu dengan yang lain dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang sah. Oleh karena sumber yang diperoleh disimpan oleh pihak-pihak yang berkompeten, maka dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut otentik dan kredibel.

Tahap *ketiga* interpretasi adalah kegiatan penafsiran data terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan perkembangan Partai Keadilan ke PKS dihubungkan antar fakta yang sama dan sejenis dengan menggunakan bantuan imajinasi dan teori, sehingga mendapatkan pemahaman terhadap fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi kemudian disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan kemudian ditempatkan di dalam urutan-urutan kausal.⁵¹ Dengan demikian penelitian ini dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu politik berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antar fakta.

Tahap *keempat*, historiografi adalah tahapan terakhir metode sejarah kritis dalam melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah masa lalu, yakni melakukan penulisan kembali peristiwa sejarah masa lalu setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil dari rekonstruksi peristiwa sejarah tersebut disebut sebagai sebuah karya historiografi, dan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan

⁵⁰Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 80-117.

⁵¹Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 169.

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri atas lima bab dan ditambah daftar pustaka serta lampiran. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Kota Semarang dan Dinamika Politik Islam di Kota Semarang 1998-2009. Bab dua ini terbagi menjadi tiga subbab pembahasan. Subbab pertama adalah Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang yang menjelaskan mengenai keadaan geografis dan demografis di Kota Semarang. Subbab kedua berjudul Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Budaya yang menjelaskan kondisi sosial politik, ekonomi, dan budaya di Kota Semarang. Subbab ketiga berjudul Partai Islam di Kota Semarang Pasca-Reformasi. Subab ini menjelaskan tentang suara masyarakat Islam, partai politik berbasis massa Islam, dan kendala partai politik Islam.

Bab III berjudul Partai Keadilan dari 1998 hingga 2003: puncak Gerakan Tarbiyah. Pada bab tiga ini terbagi menjadi tiga subbab pemahasan. Subbab *pertama* berjudul Embrio Partai Keadilan yang menjelaskan mengenai awal pergerakan Gerakan Tarbiyah di Kota Semarang sebagai embrio dari tokoh-tokoh awal pembentukkan Partai Keadilan di Kota Semarang. Dan bagaimana peran Gerakan Tarbiyah sebelum Partai Keadilan dibentuk. Subbab *kedua* berjudul Partai Keadilan di Kota Semarang. Subbab kedua menjelaskan bagaimana perjalanan Partai Keadilan hingga bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Semarang. Subbab kedua ini menceritakan tentang deklarasi Partai Keadilan di Kota Semarang dan menjelaskan tentang profil dari Partai Keadilan, mulai dari Nama, lambang, Visi, dan Misi Partai, Landasan filosofis Partai, dan Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai Keadilan Kota Semarang. Subbab *ketiga* berjudul Suara Partai Keadilan di Kota Semarang pada Pemilu 1999. Subbab ketiga menjelaskan tentang bagaimana aktivitas Partai Keadilan pada pemilu 1999 dan berapa perolehan suara Partai Keadilan Pemilu 1999 di Kota Semarang. Serta

membahas faktor-faktor mengapa suara Partai Keadilan pada Pemilu tahun 1999 sangat kecil.

Bab IV berjudul Partai Keadilan Sejahtera 2003-2009, Perubahan Citra Partai dari Eksklusif ke Inklusif. Bab empat ini dibagi menjadi tiga subbab pembahasan. *Pertama*, berjudul Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera. Subbab pertama ini menjelaskan tentang proses perubahan dari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera. *Kedua*, berjudul Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang. Subbab kedua ini menjelaskan tentang deklarasi Partai Keadilan Kota Semarang, juga menjelaskan tentang makna kata Sejahtera didalam PKS, kepemimpinan dan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera, dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera. Pembahasan *Ketiga*, berjudul Suara Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang pada Pemilu 2004 dan 2009. Di sini dijelaskan tentang proses Pemilu 2004 dan 2009. Di sini juga di jelaskan faktor-faktor kemenangan PKS Kota Semarang dalam meraup suara di Kota Semarang.

Bab V merupakan bab Simpulan. Bab ini merupakan suatu jawaban dari segala permasalahan yang telah penulis rumuskan pada bab pertama. Diharapkan melalui bab ini, dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika perubahan Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah di Kota Semarang.